

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, Kesehatan, Pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara (Safuridar & Putri, 2019).

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang juga tak lepas dari problematika kemiskinan yang melanda. Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Ini sejalan dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa arah dan tujuan pembangunan Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan, kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (Kuncoro, 2014).

Kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan yang juga merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terkait dengan pembangunan. Yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan rendah, tetapi juga mereka yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan.

Kesehatan. Air bersih sanitasi yang layak. Kendala yang dihadapi setiap masyarakat saat ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah sendiri dan fasilitas yang disediakan belum memadai (Saputri, 2021).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Majalengka ini menjadi salah satu tolak ukur indeks pembangunan masyarakat. Sektor pembangunan nasional yang menjadi indeks pembangunan manusia diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dimana kemiskinan tersebut menjadi permasalahan pada bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian tersebut mencakup beberapa sektor, salah satunya sektor peternakan. Hal ini sesuai dengan wilayah Indonesia yang memiliki potensi mayoritas masyarakat bermata pencaharian dibidang peternakan, setelah pertanian. Upaya dalam mengentaskan kemiskinan, korelasi yang paling dekat adalah dengan peningkatan pendapatan keluarga. Dalam konteks peningkatan pendapatan keluarga ini, sektor peternakan menjadi salah satu landasan dalam pengentasan kemiskinan tersebut (Ariasri & Susianti, 2022). Dibawah ini data kemiskinan pada tahun 2013-2022 di Kabupaten Majalengka.

Tabel 1. 1 Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka

Tahun	Persentase Tingkat Kemiskinan
2013	14.07
2014	13.42
2015	14.19
2016	12.85
2017	12.60
2018	10.79
2019	10.06
2020	11.43
2021	12.33
2022	11.94

Sumber: BPS, dikomplikasi Bappeda Kabupaten Majalengka tahun

2023, diolah

Selama kurun waktu 2013-2018, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu 14,7% pada tahun 2013 menjadi 10,79% pada tahun 2018%. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan menurun sekitar 0,73% sedangkan pada tahun 2020-2021 kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu 12.33%. Pada tahun 2022 kemiskinan dalam angka 11.94 menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan suatu negara atau daerah dapat menjadi tolak ukur terhadap kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena faktor yang mempengaruhi, diantaranya indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran. IPM menjadi tolak ukur terhadap pembangunan suatu negara dari sisi kesehatan, pendidikan, standar hidup. Semakin tinggi IPM suatu daerah semakin baik kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Oleh karena itu, semakin tinggi IPM di Indonesia, semakin kecil kemungkinan orang hidup dalam kemiskinan (Nuzulia, 2023).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan juga dapat disebabkan oleh efek buruk dari pengangguran, karena berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Rahmadeni, 2019). Menurut Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (Adhim, 2011).

Dalam hal ini kontribusi pendapatan asli daerah sangat diperlukan untuk mengatasi beberapa masalah dalam sebuah daerah guna mengurangi masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial serta pengangguran. Dengan adanya pendapatan asli daerah masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan atau kurang mampu dalam hal ini pendapatan asli daerah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan (Laksmi, 2017). Serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas (Sahlan et al., 2022).

Dibawah ini tabel data pendapatan asli daerah tahun 2013-2022 di Kabupaten Majalengka.

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen %
2013	145.060.000.000,00	3,75%
2014	223.120.890.621,00	5,77%
2015	283.735.793.231,00	7,34%
2016	331.376.308.047,00	8,57%
2017	513.783.824.021,55	13,29%
2018	449.974.129.888,60	11,63%

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen %
2019	439.843.264.594,55	11,38%
2020	490.833.472.193,06	12,69%
2021	466.788.495.605,11	12,07%
2022	522.456.419.586,61	13,51%

Sumber: BPS, dikomplikasi Bappeda Kabupaten Majalengka tahun 2023, diolah

Berdasarkan dari data BPS dapat diketahui bahwa untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majalengka pada sepuluh tahun terakhir mengalami naik turun dari tahun 2013-2022. Adanya pasang surut dalam kurung waktu setiap tahunnya pada tahun 2013 – 2017 mengalami kenaikan yang begitu drastis. Pada tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan sebanyak 11,63% dan 11,38%. Selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 490.833.472.193,06. Pada tahun 2021 mengalami penurunan pada angka 12,07%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,51% atau 522.456.419.586,61.

Dalam pengangguran ada beberapa jenis pengangguran salah satunya tingkat Pengangguran terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Haile G, 2023).

Selain itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), upah, inflasi, dan investasi (Rambe et al., 2019). Dibawah ini tabel data pengangguran pada tahun 2013-2022 di Kabupaten Majalengka.

Tabel 1. 3 Data Tingkat Pengangguran Kabupaten Majalengka

Tahun	Tingkat Pengangguran
2013	7,35
2014	4,47
2015	4,01
2016	3,50
2017	5,20
2018	4,95
2019	4,37
2020	5,84
2021	5,71
2022	4,16

Sumber: BPS, dikompilasi Bappeda, Tahun 2023, diolah

Menurut data BPS Secara umum perkembangan pengangguran di Kabupaten Majalengka selama sepuluh tahun terakhir dalam kategori cukup bagus, dilihat dari nilai tahun 2013 sebesar 7,35% menurun sebesar 2,88% dari tahun 2014 sebesar 4,47%. Pada tahun 2015 menurun sebanyak 46% menjadi 4,01%. Di angka tahun 2016 menjadi 3,50 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,20%. Setelah itu pada tahun 2018-2019 menurun. Setelah pada tahun sebelumnya menurun sekarang naik kembali pada tahun 2020-2021 naik selama 2 tahun. Dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,16%. Ini ditandai dengan angka pengangguran yang selalu ada di bawah angka Provinsi Kabupaten Jawa Barat.

Pengangguran juga dapat disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi

tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang. Kesejahteraan masyarakat dan IPM antar daerah cenderung beragam. Keragaman ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi maupun struktur geografisnya. Struktur ekonomi dan penunjang kehidupan yang berbeda-beda menyebabkan angka pengangguran di setiap kabupaten kota tidaklah sama (Mahmud & Pasaribu, 2021).

Menurut Todaro dan Smith (2006) pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin, dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Ketika produktivitas kerja menurun atau rendah akan memicu rendahnya perolehan pendapatan yang diterima. Semakin bagus tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang mumpuni, hidup yang layak akan mempengaruhi produktivitas kerja sehingga hasil kerja akan meningkat dan berkualitas. Berikut merupakan perkembangan mengenai kualitas sumber daya manusia pada wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diukur dengan IPM.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi (Suliswanto, 2012). Oleh sebab itu, Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2017). Kabupaten Majalengka, seperti banyak daerah lain di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunannya, salah satunya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengukur kemajuan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Dibawah ini tabel data indeks pembangunan manusia pada tahun 2013- 2022.

Tabel 1.4 Data Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2013	63.71
2014	64.07
2015	64.75
2016	65.25
2017	65.92
2018	66.72
2019	67.52
2020	67.59
2021	67.81
2022	68.56

Sumber: BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Majalengka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan dari data BPS nilai capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022, indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat walaupun hanya 1,106% dibandingkan 2021. Jika dibandingkan jawa dan nasional sudah masuk kategori tinggi, nilai capaian Kabupaten Majalengka masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Majalengka.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa IPM mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini karena kemiskinan dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang layak, dan tingkat kesehatan yang layak dapat menyebabkan tidak ada peningkatan pada sumber daya manusia dan dapat menyebabkan pengangguran meningkat (Prasetyoningrum et al., 2018).

Selain dari tiga komponen utama indeks pembangunan manusia yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak yang dijadikan sebagai model pengukuran yang utama, terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terhadap IPM, baik faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah maupun faktor sosial seperti kemiskinan, teknologi, dan lain sebagainya (Muhamad & Rahmi, 2023).

Permasalahan ekonomi Negara berkembang selain kemiskinan juga tingkat pengangguran yang tinggi, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kedua hal ini sangat berkaitan karena pengangguran dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kecamatan Majalengka, trendnya selalu meningkat seiring berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan meningkatnya kualitas sistem pendidikan dan kesehatan, sehingga pengembangan sumber daya manusia terus membaik yang dapat mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka (BPS, 2023). Walaupun dilihat dari data yang ada indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi dalam kemiskinan masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan Jawa Barat dan nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Majalengka dibandingkan dengan Kabupaten lainnya pada september 2021 berada pada posisi ke-16 persentase. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran merupakan pekerjaan rumah bagi setiap pemerintah daerah, akan tetapi setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang merupakan aspek penting bagi setiap pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahannya (Prasetyoningrum et al., 2018).

Urusan pemerintah yang dulunya sentralisasi berubah menjadi pemerintah yang desentralisasi dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya, hal tersebut menyebabkan tiap pemerintahan daerah harus meningkatkan kemandiriannya

dalam mengurus otonomi tiap tiap daerahnya, maka dari itu Pendapatan Asli Daerah turut berperan dalam mensejahterakan masyarakatnya, serta melakukan pembangunan dan pemberdayaan guna mencapai tujuan yang diinginkan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Menurut Suryani Suryani et al., (2023) bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. maka salah satu upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan manusia atau peningkatan SDM, karena SDM merupakan kunci utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halisa (2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Menurut Sarkoro & Zulfikar (2018) pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif indeks pembangunan manusia (IPM) karena pendapatan asli daerah berperan sangat penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Riviando et al., (2019) pendapatan asli daerah (PAD) tidak terdapat pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Menurut Imanuel Andre Aditya et al.,(2021) pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemakmuran hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang menjadi faktor dominan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Chalid & Yusuf (2014). Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tumbuan et al., (2023) bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam indeks pembangunan manusia menjadi variabel intervening untuk melihat apakah variabel indeks pembangunan manusia memediasi atau memiliki pengaruh

terhadap pendapatan asli daerah dan pengangguran terhadap kemiskinan, menggunakan variabel bebas pendapatan asli daerah dan pengangguran, variabel terikat kemiskinan. Untuk lokasi penelitian di Kabupaten Majalengka.

Melihat keterkaitan tersebut, pembangunan menjadi hal utama di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, besarnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) tidak hanya dipengaruhi dari segi harapan lama sekolah, harapan hidup dan layak hidup, akan tetapi permasalahan makro seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan naik turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat judul penelitian kuantitatif **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Majalengka”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dirumuskan dalam beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari 10 tahun terakhir pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- b. Naik turunnya pendapatan asli daerah bisa karena kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
- c. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan pada 10 tahun terakhir namun tidak dapat menduduki peringkat yang tinggi se- Jawa Barat.
- d. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Majalengka tidak disertai dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2013-2022.
- e. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan.

- f. Tingginya angka pengangguran berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan.
- g. Angka kemiskinan masih dalam 16 persen masih dalam rata-rata no. 4 tertinggi jawa barat.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak pembahasan yang harus diatasi, agar penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, sehingga tidak melebar terlalu jauh perlu adanya pembatasan masalah.

- a. Dalam pembatasan masalah fokus penelitian hanya tertuju pada pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran sebagai *variabel independen* secara berturut-turut (X1 dan X2) terhadap kemiskinan sebagai *variabel dependen* (Y) serta indeks pembangunan manusia sebagai *variabel intervening* (Z). Pendapatan asli daerah, pengangguran, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang dimaksud adalah seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Majalengka pada tahun 2013-2022.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten Majalengka, terlepas dari wilayah tersebut tidak termasuk kedalam penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan kemiskinan di Kabupaten Majalengka?
- b. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka ?
- c. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka ?
- d. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka ?

- e. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka ?
- f. Apakah indeks pembangunan manusia memediasi variabel pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka ?
- g. Apakah indeks pembangunan manusia memediasi variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia memediasi variabel pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka
- g. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah indeks pembangunan manusia memediasi variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Majalengka

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran terhadap kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening bagi para mahasiswa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi dalam hal pendapatan asli daerah dan indeks pendapatan manusia serta pengangguran yang bisa digunakan sebagai cara pengentasan kemiskinan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan pengangguran terhadap kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening di Kabupaten Majalengka.

3. Kegunaan Teoris

Penelitian yang ditulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang pendidikan khususnya bagi mahasiswa ilmu ekonomi dan dapat dijadikan referensi penelitian yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Bab ini berisi mencakup kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoritik.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup objek penelitian, menentukan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis statistik.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini meliputi deskripsi data, persyaratan uji hipotesis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan peneliti.

